



PEMERINTAH KOTA PALU DINAS PEKERJAAN UMUM



LAKIP

**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Tahun 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ini disusun selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang dibuat secara periodik, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021-2026. Laporan ini sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum sehingga dapat memotivasi instansi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih optimal. Disamping itu laporan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya.

Diharapkan apa yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. LAKIP ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama tahun 2022 agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palu, Maret 2023

Kepala Dinas



Ir. Sigit B. Prasetyo, M.Eng., Sc

Pembina Utama Muda

NIP 19641111 199703 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu merupakan implementasi program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu yang dijabarkan dalam program dan kegiatan dinas. Visi Pemerintah Kota Palu tahun 2021 – 2026 adalah **“Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman, dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”**.

Ditinjau dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum keterkaitan langsung mengemban misi Pemerintah Kota Palu yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah Misi 2 yaitu **“Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana”**.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu tersebut, telah ditetapkan tujuan, sasaran, dan indikator sesuai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yang telah tercapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
						Capaian
1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Jalan	Persentasi Jalan dalam Kondisi Mantap	67,45 %	69,29%	102,72%
		Meningkatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ke PU an	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	95,31 %	92,54%	97,09%
		Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor	Persentase Bangunan Gedung	32,18 %	36,78%	114,29

		yang berketahanan	Kantor yang sesuai standar bangunan			
2.	Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	Nilai Sakip	BB		

Rata – rata capaian sebesar 99,46 %

Untuk mencapai kinerja tersebut, didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. **217,517,381,460.00** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **201,745,571,786.00** atau dengan kata lain capaian realisasi penggunaan anggaran sebesar 92,75 %.

Bila disandingkan antara realisasi capaian kinerja dan penggunaan anggaran, maka didapat gambaran sebagai berikut :

Realisasi Kinerja	:	Realisasi Anggaran
99,46 %		92,75 %

Kriteria pencapaian indicator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi 50% (Permenpan No. 54 Tahun 2014), dengan demikian capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dinyatakan berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,46 %.

Didalam analisis diuraikan mengenai hambatan-hambatan untuk kegiatan yang tidak mencapai sasaran. Hal ini sebagai tindakan korektif untuk pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Secara umum dapat dikemukakan bahwa hambatan dan kendala berasal dari factor internal dan eksternal yang menyangkut

sumber daya, baik masyarakat maupun pegawai, dana dan sarana/prasarana untuk kegiatan kedinasan. Hal ini akan menjadi tantangan bagi dinas yang menangani urusan Pekerjaan Umum untuk dapat mencapai target dan realisasi anggaran di tahun yang akan datang sesuai dengan dokumen kerja RPJMD Kota Palu periode 2021 -2026 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum periode 2021 –2026.

Palu, Maret 2023



Ir. Singgih B. Prasetyo, M.Eng., Sc

Pembina Utama Muda

NIP 19641111 199703 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum Organisasi

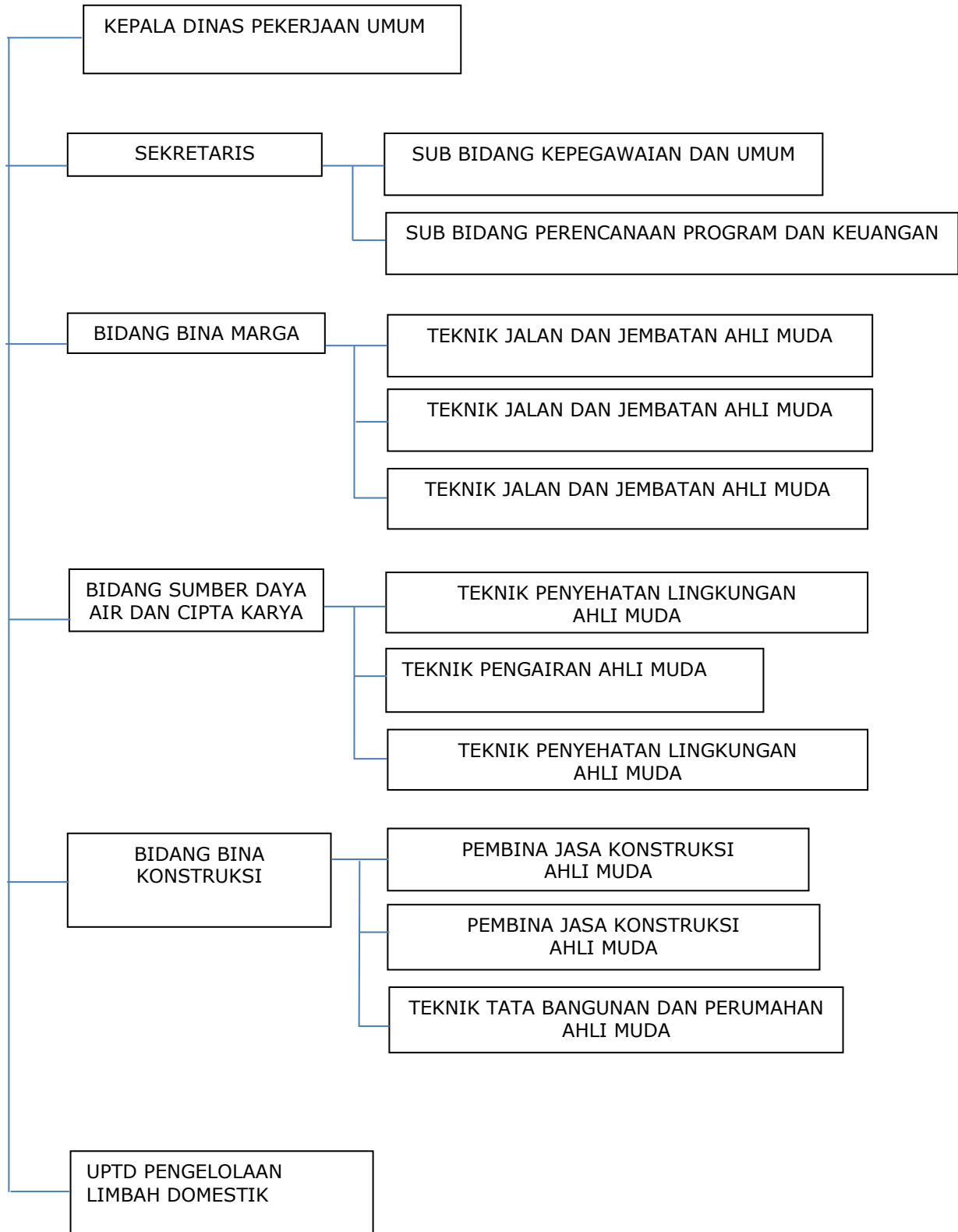
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terdiri dari

1. Kepala Dinas yang membawahi :
2. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
3. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
 - Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
 - Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
4. Bidang Sumber Daya Air dan cipta Karya yang terdiri dari :
 - Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
 - Teknik Pengairan Ahli Muda; dan
 - Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
5. Bidang Bina Konstruksi yang terdiri dari :
 - Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda ;
 - Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda ; dan
 - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Limbah Domestik
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu selengkapnya diilustrasikan pada gambar di bawah ini :

GAMBAR 1.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PU KOTA PALU



1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis, Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan pembangunan fisik dan membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kota.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Kota Palu memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembangunan fisik Kota Palu
- b. Melaksanakan kegiatan Fisik pembangunan
- c. pemantauan, tindak lanjut hasil kegiatan fisik
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Isu Strategis

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu menjalankan pelayanan di bidang kebinamargaan, sumber daya air dan cipta karya, serta bidang bina konstruksi di wilayah Kota Palu. Dengan semakin baiknya kondisi di bidang pekerjaan umum tersebut diharapkan akan semakin merata dan sejahtera ekonomi dan sosial masyarakat Kota Palu. Terkait dengan upaya tersebut, terdapat 4 isu strategis utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, yakni :

1. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk dapat memberikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.
2. Pembangunan beberapa gedung kantor Perangkat Daerah yang terhambat karena tidak ada ketersediaan lahan dan pembangunan gedung kantor yang mempunyai struktur tahan gempa
3. Memanfaatkan dan mengelolah dengan baik sumber air baku sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan air bersih/minum dan mengoptimalkan pemanfaatan debit air untuk kinerja jaringan irigasi bag masyarakat.
4. Menangani seluruh kawasan genangan akibat banjir, kawasan rawan banjir dan garis pantai yang terkena abrasi dengan pembangunan drainase,

pembangunan dinding penahan dan normalisasi sungai.

5. Menentukan dan menata batas administrasi Wilayah pelayanan air bersih/minum, khususnya Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum berdasar kepada :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang;
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum.
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

Untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya. Kondisi dan potensi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi.

a. Faktor-faktor kekuatan tersebut, antara lain :

- 1) Untuk menunjang tugas rutin sehari-hari, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang saat ini memiliki jumlah pegawai 173 orang, yang terdiri dari 90 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan 83 orang PHL (Pegawai Harian Lepas).
- 2) Pegawai Dinas Pekerjaan Umum sebesar 60,11% berpendidikan sarjana, hal ini merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme perencana.
- 3) Adanya dokumen perencanaan daerah yang hirarkinya sudah jelas, yaitu : jangka panjang, menengah, dan tahunan.

b. Faktor-faktor kelemahan, antara lain :

- 1) Tidak tersedianya sarana dan prasarana kerja tidak tetap
- 2) Masih terbatasnya personil yang belum mengikuti diklat, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan teknis di bidangnya.
- 3) Koordinasi antar Bidang/Sekretariat maupun didalam Bidang/Sekretariat belum berjalan secara optimal. Antara lain dalam hal pengumpulan data, perencanaan, distribusi personil, penganggaran dan kerja sama dalam hal pekerjaan.
- 4) Perencanaan jangka menengah belum sepenuhnya dapat diterjemahkan/dijabarkan kedalam program tahunan sehingga pembangunan tidak berjalan secara berkesinambungan.

c. Faktor-faktor peluang, antara lain :

- 1) Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif.
- 2) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah, terutama yang terkait dengan infrastruktur.
- 3) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 4) Perkembangan teknologi informasi yang sangat menunjang didalam penyusunan produk-produk perencanaan.
- 5) Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan dan pembangunan infrastruktur.

d. Faktor-faktor ancaman, antara lain :

- 1) Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses demokrasi di daerah.
- 2) Globalisasi cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi, dan budaya.
- 3) Belum tersedianya petunjuk operasional sehingga menghambat proses perencanaan.
- 4) Belum konsistennya penerapan asas desentralisasi.
- 5) Belum tersedianya petunjuk operasional dari beberapa peraturan perundangan.
- 6) Adanya kerancuan kewenangan dalam beberapa sektor.
- 7) Belum tersedianya petunjuk operasional sehingga menimbulkan multitafsir dan akhirnya menimbulkan konflik antara pusat dan daerah.
- 8) Masih adanya alokasi kegiatan dan anggaran yang bukan untuk kepentingan publik. Dfhgdh

1.7 Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas

Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusunan LAKIP dan sistem penyajian LAKIP.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Renstra 2016-2021 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama 5 (Lima) Tahun, lalu penjelasan target IKU 5 (Lima) Tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB 4 PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaian serta langkah, solusi dalam perbaikan

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi pemerintahan yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan didalam pelaksanaannya. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan foto permasalahan unit organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dalam pengelolaan/manajemen kepegawaian. Adapun Visi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu **“Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman, dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”**.. Untuk mewujudkan Visi Kota Palu di atas, dirumuskan 4 (empat) Misi yaitu sebagai berikut :

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan
4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

Untuk Misi Kota Palu Tahun 2021-2026, maka Dinas Pekerjaan Umum masuk pada Misi 2, yaitu **“Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap**

bencana “. Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat Perangkat Daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021 – 2026.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2022 yang telah ditandatangani adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian kinerja tahun 2022 Periode 2021 -2026
Dinas pekerjaan umum kota palu

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1		2	3	
1	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	67,45	%
2	Meningkatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ke PU an	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	95,31	%
3	Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor yang berketahanan	Persentase Bangunan Gedung Kantor yang sesuai standar bangunan tahan gempa	32,18	%
4	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	Nilai SAKIP	B	%

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu untuk periode 2021 – 2026, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu (RPJMD) 2021 – 2026.

Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang akan digunakan untuk periode waktu Tahun 2021 – 2026 Sesuai Periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mabtap	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik + Sedang}}{\text{Panjang seluruh jalan Kota}} \times 100 \%$	Laporan Data	Bidang Bina Marga
2	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ke PU an	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	$\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani air bersih setiap hari}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Palu}} \times 100 \%$	Laporan Data	Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya
3	Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor yang berketahanan	Persentase Bangunan Gedung Kantor yang sesuai standar Bangunan Tahan Gempa	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung kantor yang layak dan sesuai standar bangunan tahan gempa}}{\text{Jumlah bangunan gedung negara Kota Palu}} \times 100 \%$	Laporan Data	Bidang Bina Konstruksi
4	Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Penilaian	Sekretariat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Adapun predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Skala nilai(%)	Kesimpulan evaluasi
1	85–100	Sangat Berhasil
2	70–84,99	Berhasil
3	55–69,99	Cukup Berhasil
4	<54,99	Tidak Berhasil

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel. 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan	Persentase kondisi Jalan mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik+sedang}}{\text{Panjang Jalan Kota Palu}} \times 100 \%$	67,45%	69,29 %	102,72 %
Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ke PU an	Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani air bersih setiap hari}}{\text{Jumlah penduduk Kota Palu}} \times 100\%$	95,31 %	92,54 %	97,09 %
Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor yang berketahanan	Persentase tersedianya bangunan gedung kantor yang sesuai standar bangunan tahan gempa	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung kantor yang layak dan sesuai standar bangunan tahan gempa}}{\text{Jumlah bangunan gedung kantor Kota Palu}} \times 100\%$	32,18 %	36,78 %	114,29 %
Meningkatnya Akuntabilitas, Transaparansi, dan Kinerja Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	Nilai SAKIP	Penilaian Inspektorat	B		

Pengukuran ini ditujukan untuk menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan beserta uraian dan target indikator masing-masing kegiatan.

Melalui formulir pengukuran pencapaian dapat dilihat apakah sasaran dari kegiatan tersebut tercapai atau tidak. Dengan demikian pengukuran kinerja sangat tergantung kepada penetapan sasaran dari masing-masing kegiatan.

A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

Capaian indikator jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang terhadap panjang jalan di kota palu. Dimana panjang jalan kota palu dalam kondisi baik dan sedang sampai dengan tahun 2021 adalah 542,33 km dan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang sampai dengan tahun 2022 adalah 590,033 km dan total panjang jalan yang menjadi kewenangan kota palu adalah 851,558 km.

Tabel. 3.2

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

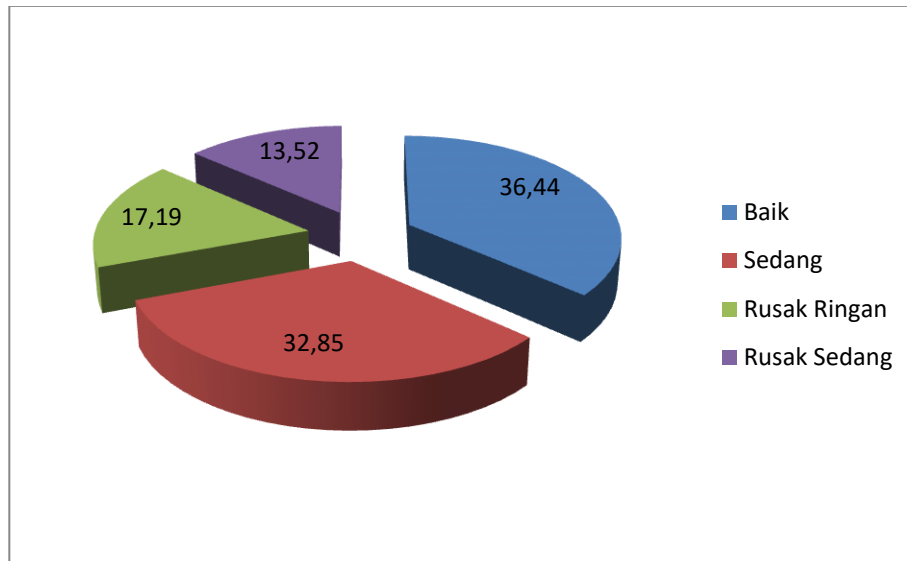
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan	Persentase kondisi Jalan mantap	67,45%	69,29%	102,72%

Tabel 3.3

Data kondisi Jalan Tahun 2022

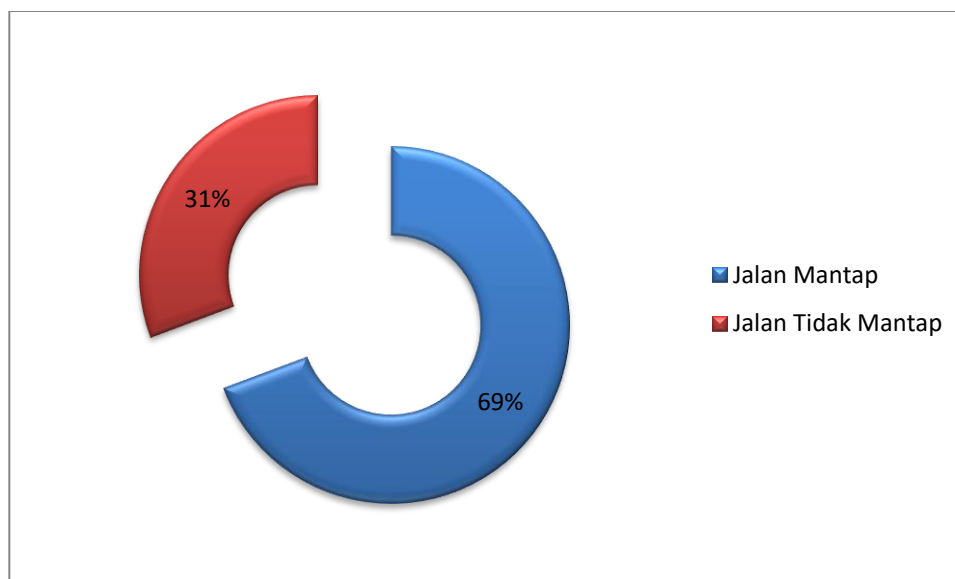
No.	Kondisi Jalan	2022	%
1.	Baik	310,33 Km	36,44
2.	Sedang	279,71 Km	32,85
3.	Rusak Ringan	146,42 Km	17,19
4.	Rusak Berat	115,11 Km	13,52

Gambar 3.1
Diagram Persentase kondisi Jalan



Untuk pengukuran indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum adalah kemantapan jalan dalam Kota Palu didapatkan dengan menjumlahkan total jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang di bagi jumlah panjang jalan dalam Kota palu seluruhnya. Sehingga didapatkan jalan Kondisi Mantap 69,29 % dan Kondisi Tidak mantap 30,71 % .

Gambar 3.2
Perbandingan Jalan Kondisi Mantap dan Tidak Mantap



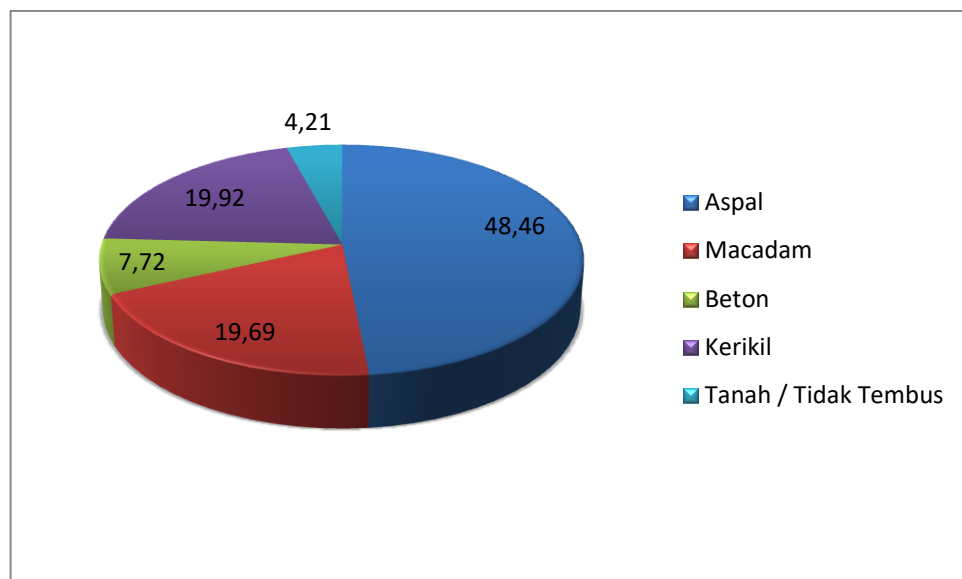
Tabel 3.3
Kondisi jenis permukaan jalan

No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang	%
1.	Aspal	412.63 km	48,46 %
2.	Macadam	167.70 Km	19,69 %
3.	Beton	65.72 Km	7,73 %
4.	Kerikil	169.65 Km	19,92 %
5.	Tanah / Tidak Tembus	35,85 Km	4,21 %

Dengan melihat data jenis permukaan jalan yang ada dalam Kota Palu jenis permukaan yang paling mendominasi adalah permukaan jalan yang sudah di aspal yaitu sepanjang 48,46 % dengan panjang 412.63 Km dari panjang total jalan Kota Palu 851.558 Km.

Gambar 3.3

Gambar Diagram komposisi jenis permukaan jalan dalam Kota Palu



Hasil Survey Kondisi Jalan Tahun 2022

Pengukuran capaian indikator kinerja utama tahun 2022 terhadap kemantapan jalan sebesar 69,29 % dari target sebesar 67,45 % , melebihi target sebesar 102,72. Pencapaian melebihi target disebabkan karena penanganan pembangunan jalan dalam kota lebih difokuskan pada jalan yang terintegrasi dalam satu kawasan.

B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ke PU an

Tabel 3.4

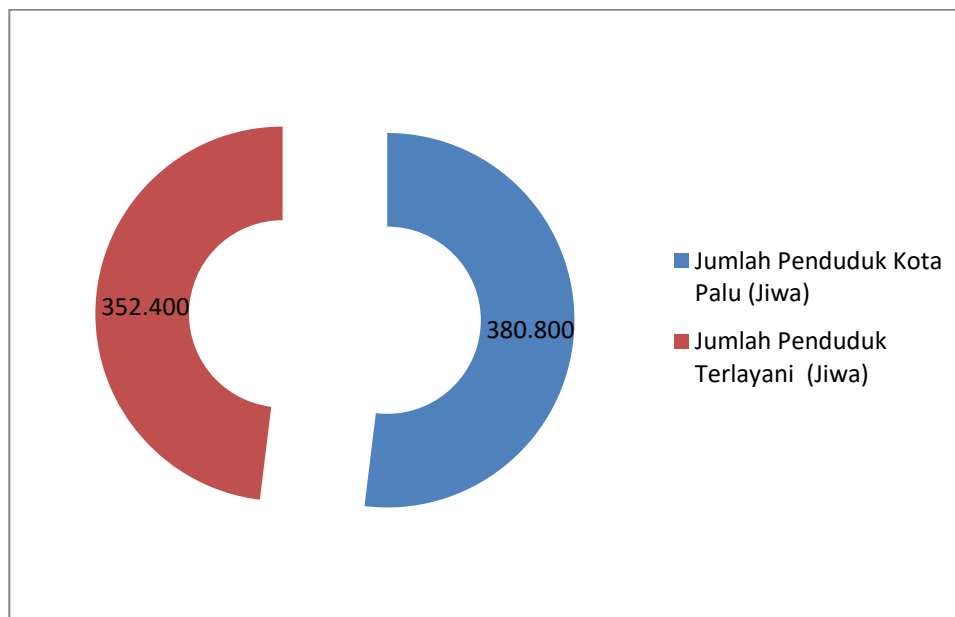
Target dan Realisasi serta Capaian Kinerja Sastra 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ke PU an	Persentase penduduk berakses air minum	95,31%	92,54%	97,09%

Capaian indikator jumlah penduduk yang terlayani air bersih terhadap jumlah penduduk yang ada dalam kabupaten/Kota. Dimana jumlah penduduk yang terlayani kebutuhan air bersih terdiri dari yang dilayani melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 354.805 jiwa sedangkan jumlah penduduk Kota Palu sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 380.800 jiwa.

Gambar 3.4

Gambar Diagram Perbandingan Jumlah penduduk yang terlayani terhadap jumlah penduduk di Kota Palu



Pengukuran capaian indikator kinerja utama tahun 2022 terhadap Jumlah rumah tangga terlayani air bersih sebesar 92,54 % dari target 95,31 % dengan capaian kinerja sebesar 97,09 % mengalami kenaikan sebesar 0,54 %, dari capaian kinerja tahun 2021. Hal ini disebabkan jumlah pelanggan pada jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kota Palu mengalami peningkatan sebanyak 9.124 Pelanggan. Sedangkan jumlah pelanggan untuk PDAM yang di kelola oleh PDAM Donggala mengalami penurunan akibat banyaknya jaringan pipa yang rusak yang disebabkan Bencana Alam Tahun 2018. Untuk jaringan perpipaan yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum mengalami kendala dalam hal pendistribusian air bersih ke masyarakat karena sumber mata air yang jauh dari pemukiman dan masih adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan air bersih oleh masyarakat tertentu.

C. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor yang berketahanan

Tabel. 3.5

Target dan Realisasi serta Capaian Sastra 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor yang berketahanan	Persentase tersedianya bangunan gedung kantor yang sesuai standar bangunan tahan gempa	32,18%	36,78%	114,29%

Pengukuran capaian indikator kinerja utama tahun 2022 terhadap jumlah bangunan gedung kantor yang layak dan sesuai standar bangunan tahan gempa dengan target adalah sebesar 36,78 % dari target 32,18 %. Pencapaian kinerja pada persentase bangunan gedung kantor yang layak dan sesuai standar bangunan tahan gempa

mengalami kenaikan sebesar 69,06 %, capaian pada tahun 2021 sebesar 45,23 % sedangkan capaian pada tahun 2022 sebesar 114,29 % hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk pembangunan gedung kantor lebih besar dari tahun sebelumnya.

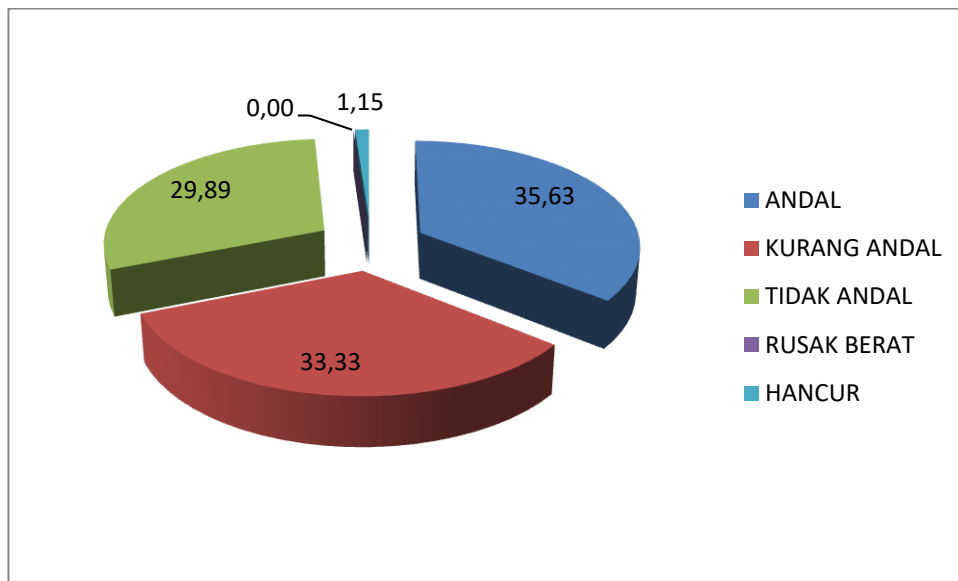
Tabel. 3.6

Data kondisi bangunan Gedung Pemerintah pada Pemerintah Kota Palu

NO	Uraian	Jumlah	KONDISI EKSISTING				
			ANDAL	KURANG ANDAL	TIDAK ANDAL	RUSAK BERAT	HANCUR
1	Kantor Kelurahan	46	23	13	9	0	1
2	Kantor Camat	8	5	0	3	0	0
3	OPD	33	3	16	14	0	0
	Jumlah	87	31	29	26	0	1

Gambar 3.5

Komposisi kondisi Gedung Pemerintah yang ada di Kota Palu



Capaian kinerja terhadap realisasi target 114,29 % melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pembangunan gedung kantor sesuai standar bangunan tahan gempa menjadi prioritas untuk pembangunan gedung yang berketahanan.

Gambar : 3.6. Pembangunan Gedung Kantor



D. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Akuntabilitas, Transapransi, dan Kinerja Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum

Untuk pengukuran Indikator Kinerja Utama pada Sasaran strategis yang ke empat pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu adalah Nilai SAKIP yang merupakan penilaian hasil evaluasi Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum. Namun pada saat penyusunan Laporan Kinerja ini hasil penilaian terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Belum.

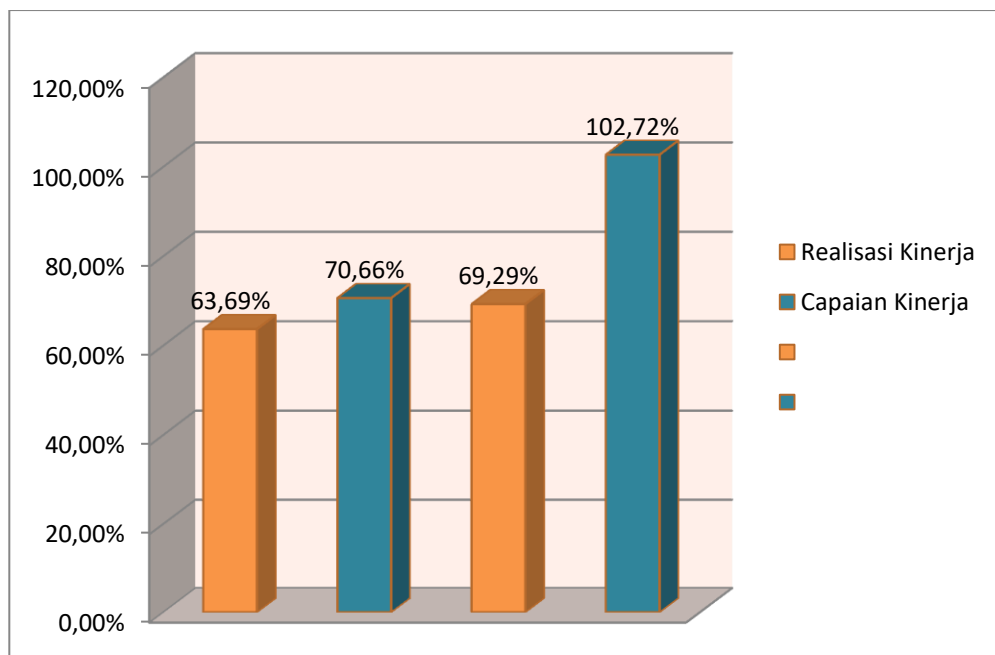
3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN LALU

Tabel 3.7
Sasaran : Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan	Persentase kondisi Jalan mantap	67,45%	69,29%	102,72%	90,14%	63,69%	70,66%

Capaian indikator jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang terhadap panjang jalan di kota palu. Dimana panjang jalan kota palu dalam kondisi baik dan sedang sampai dengan tahun 2021 adalah 542,33 km dan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang sampai dengan tahun 2022 adalah 590,033 km dan total panjang jalan yang menjadi kewenangan kota palu adalah 851,558 km.

Gambar 3.7 Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja antara tahun 2022 dan tahun 2021 untuk indicator jalan dalam kondisi mantap



Dari tabel diagram di atas menggambarkan capaian kinerja tahun 2021 mencapai 70,66% .Hal ini disebabkan karena realisasi kinerja hanya mencapai 63,69% dari target sebesar 90,14% sedangkan capaian pada tahun 2022 mencapai 102,72% dimana realisasi kinerja mencapai 69,29 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 67,45%

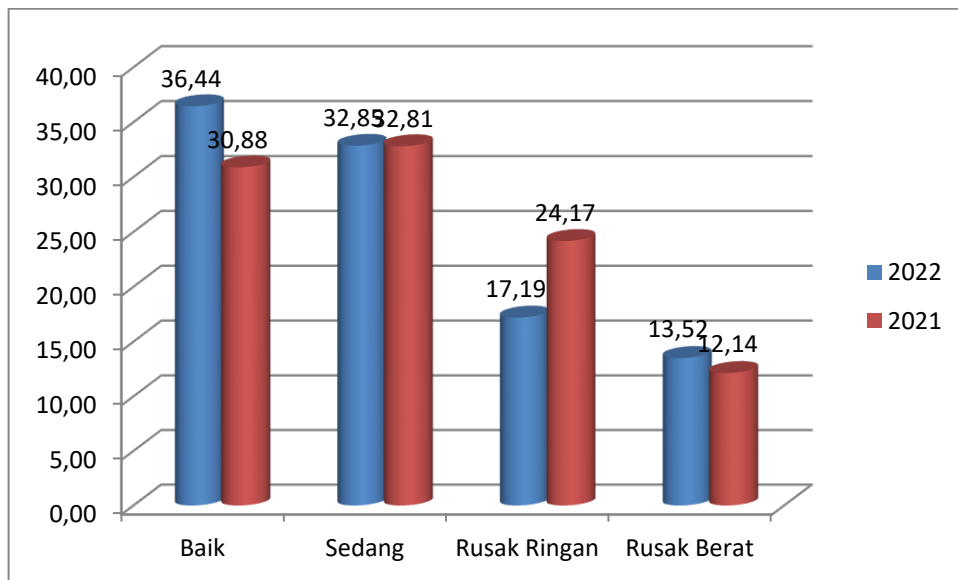
Berikut perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Kondisi Jalan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No.	Kondisi Jalan	2021	2022
1.	Baik	262,95 Km	310,33 Km
2.	Sedang	279,38 Km	279,71 Km
3.	Rusak Ringan	205,81 Km	146,42 Km
4.	Rusak Berat	103,41 Km	115,11 Km

Gambar 3.8 Diagram kondisi Jalan



Hasi Survey Kondisi Jalan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Dari Diagram diatas menggambarkan perbandingan kondisi jalan antara tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk kondisi baik dan sedang dimana kondisi jalan baik pada tahun 2021 hanya 30,88% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 36,44%. Kondisi jalan baik meningkat jadi 310,33 Km atau mengalami kenaikan kondisi jalan baik sepanjang 47,38 Km.

Gambar 3.9 Pembangunan Jalan



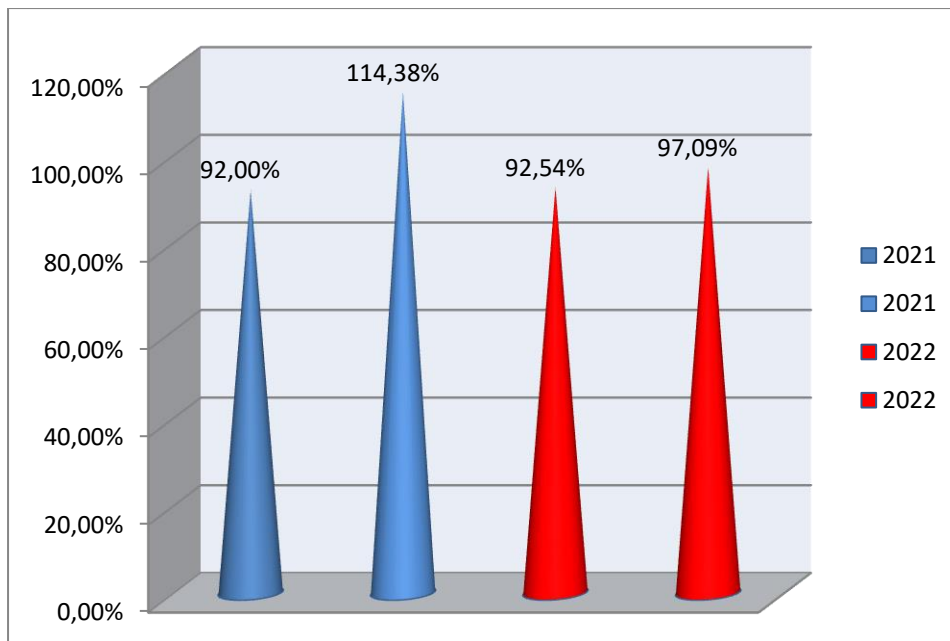
Tabel 3.9
 Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ke PU an

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ke PU an	Persentase penduduk berakses air minum	95,31%	92,54%	97,09%	80,43%	92,00%	114,38%

Penjelasan pada tabel di atas menggambarkan realisasi pada tahun 2021 sebesar 92,00% melampaui target yang sudah ditetapkan sebesar 80,43%

sehingga capaian kinerja mencapai 114,38%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 92,54% dari target 95,31% capaian kinerja hanya mencapai 97,09%. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 yaitu 114,38 dan 97,09% hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan pada tahun 2021 hanya 80,43% sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 95,13%.

Gambar 3.10 Komposisi Perbandingan Antara realisasi capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022



Gambar 3.11 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih



Tabel 3.10
Sasaran : Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor yang berketahanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor yang berketahanan	Persentase tersedianya bangunan gedung kantor yang sesuai standar bangunan tahan gempa	32,18%	36,78%	114,29%	31,76%	45,23%	142,41%
---	--	--------	--------	---------	--------	--------	---------

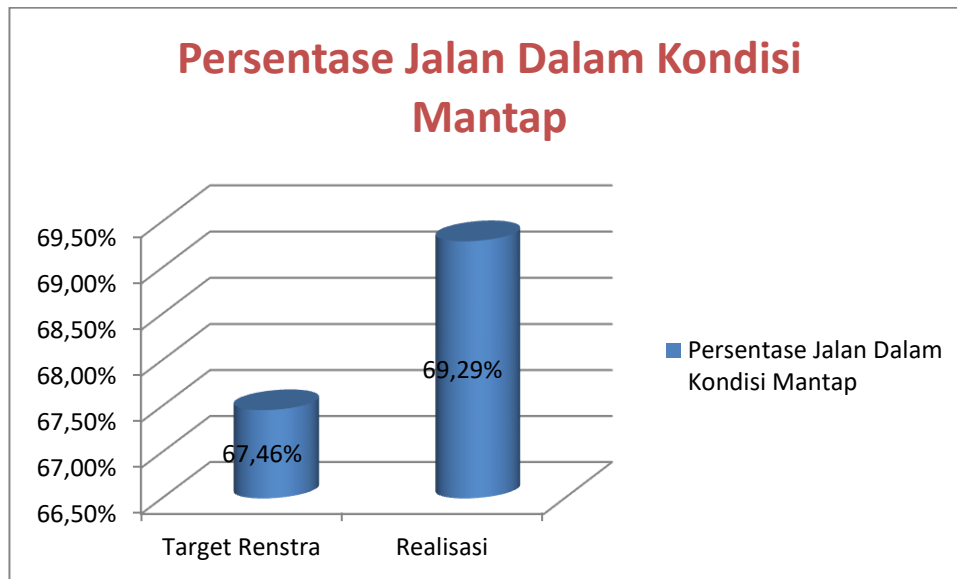
Pengukuran capaian indikator kinerja utama tahun 2022 terhadap jumlah bangunan gedung kantor yang layak dan sesuai standar bangunan tahan gempa dengan target adalah sebesar 36,78 % dari target 32,18 %. Pencapaian kinerja pada persentase bangunan gedung kantor yang layak dan sesuai standar bangunan tahan gempa mengalami kenaikan sebesar 69,06 %, capaian pada tahun 2021 sebesar 45,23 % sedangkan capaian pada tahun 2022 sebesar 114,29 % hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk pembangunan gedung kantor lebih besar dari tahun sebelumnya.

Gambar : 3.12 Pembangunan Gedung Kantor



3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 - 2026

Realisasi kinerja terhadap indikator kinerja utama persentase panjang jalan mantap pada tahun 2022 sebesar 69,29 % melebihi target renstra yaitu sebesar 67,45 %. hal ini disebabkan karena belanja yang dialokasikan pada infrastruktur jalan lebih besar dari tahun sebelumnya.

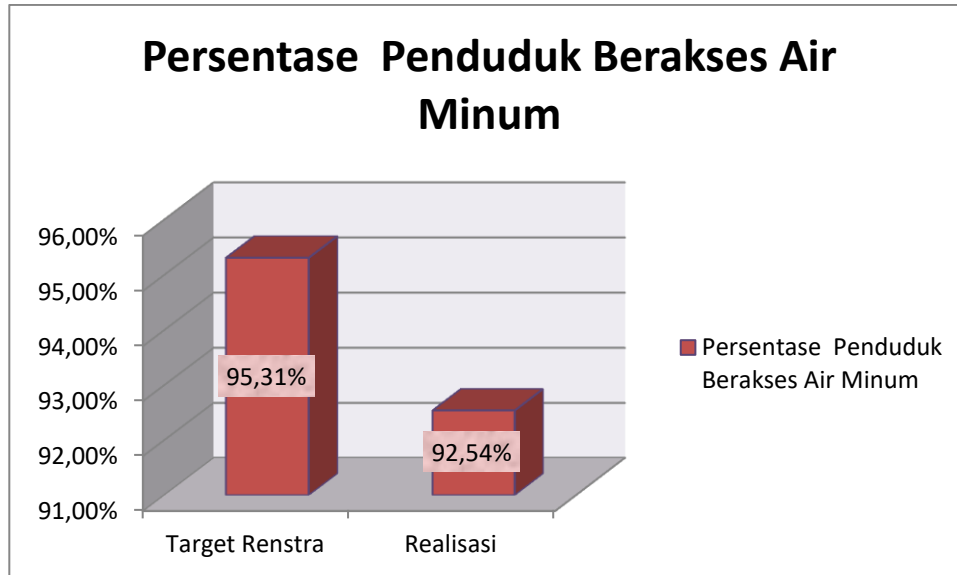


Gambar 3.13 Perbandingan antara target renstra dan realisasi kinerja

Peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2022 sepanjang 590.033 Km dibandingkan dengan Tahun 2021 587.224 Km. Terdapat peningkatan kondisi jalan baik dan sedang sepanjang 2.809 Km. Meskipun kenaikannya tidak signifikan namun karena target yang kami turunkan pada tahun pada Renstra 2021-2026 karena target yang kami jadikan target awal Renstra adalah kondisi kemantapan jalan di akhir Renstra tahun 2016-2021.

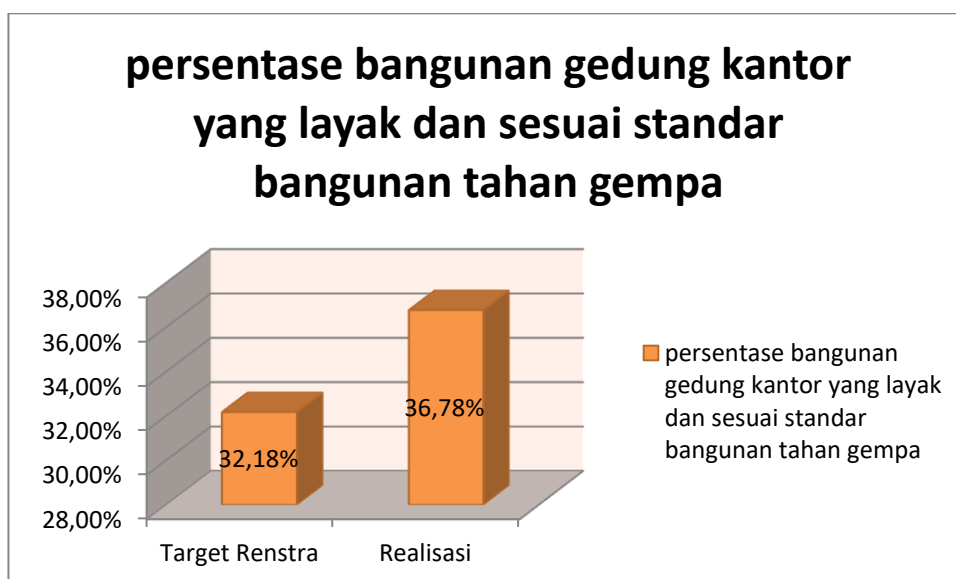
Realisasi kinerja terhadap indikator persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2022 sebesar 92,54 % tidak mencapai target renstra yaitu sebesar 95,31 %. Hal ini disebabkan pada jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM masih dalam perbaikan akibat banyaknya jaringan pipa yang rusak yang disebabkan Bencana Alam Tahun 2018. Dan juga menurunnya jumlah pelanggan PDAM untuk Jaringan perpipaan . Untuk jaringan perpipaan yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum mengalami kendala dalam hal

pendistribusian air bersih ke masyarakat karena sumber mata air yang jauh dari pemukiman dan masih adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan air bersih oleh masyarakat tertentu.



Gambar 3.14 Perbandingan antara Target dan realisasi Anggaran

Realisasi kinerja terhadap indikator persentase bangunan gedung kantor yang layak dan sesuai standar bangunan tahan gempa pada tahun 2022 sebesar 36,78 % melebihi target renstra yaitu sebesar 32,18 %. hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk pembangunan gedung kantor lebih besar dari tahun sebelumnya.



Gambar 3.14 Perbandingan antara Target dan realisasi Anggaran

TABEL 3.11
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	TARGET RENSTRA	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN
Meningkatkannya kualitas layanan infrastruktur	Persentase kondisi jalan mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik+sedang}}{\text{Panjang Jalan Kota Palu}} \times 100$	67,45%	69,29 %	102,72 %
Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ke PU an	Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Jumlah penduduk terakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk kota Palu}} \times 100\%$	95,31 %	92,54 %	97,09 %
Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor yang Berketahanan	Persentase tersedianya bangunan gedung kantor yang sesuai standar bangunan tahan gempa	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung kantor yang layak dan sesuai standar bangunan tahan gempa}}{\text{Jumlah bangunan gedungkantor Kota Palu}} \times 100\%$	32,18 %	36,78 %	114,29 %
Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian Evaluasi Inspektorat	B		

3.1.4 FAKTOR PENYEBAB YANG MEMPENGARUHI REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Beberapa penyebab sehingga mempengaruhi tercapainya target indikator yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya standar yang normatif yang dapat digunakan oleh Tim Penilai, sehingga terjadi dualisme penilaian.
- b. Adanya penilaian sasaran yang membutuhkan keterlibatan institusi lain dalam pengukuran, sehingga tidak dapat langsung dinilai oleh Tim Penilai Internal.
- c. Masih terdapat kelemahan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan, sehingga ada item-item pekerjaan dari kegiatan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan tepat waktu tapi kenyataannya tidak dapat terselesaikan/batal dan juga sering sekali terjadi keterlambatan dalam pembuatan administrasi pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- d. Keterbatasan alokasi anggaran sehingga banyak pekerjaan yang tadinya direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

Dari faktor penentu keberhasilan yang telah dianalisa, maka dipandang perlu menetapkan strategi pemecahan terhadap segala permasalahan yang timbul antara lain :

1. Survey kondisi jalan
2. Peningkatan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal harus terus dilaksanakan, sehingga diharapkan pelaksana kegiatan mempunyai pemahaman serta kemampuan yang memadai untuk mencapai standar mutu pekerjaan, data base serta dalam hal sistem pelaporan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana kerja, khususnya yang berbasis teknologi maju sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tidak mengalami gagap teknologi.
4. Pada penyusunan rencana kinerja tahunan ditetapkan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang ada pada Pemerintah Kota Palu, disamping itu perlu melakukan koordinasi

dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat dalam menangani beberapa program.

5. Penganan langsung dampak bencana terhadap infrastruktur.

3.1.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang di maksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capain target kinerja tahun 2022 dengan realisasi anggaran tahun 2022. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang di inginkan tahun 2022. Realisasi anggaran tahun 2022 untuk 7 program dan 17 kegiatan sebesar Rp. 201.745.571.786,- atau 92.75 % dari target belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 217.517.381.460,-

TABEL 3.12

**PERBANDINGAN REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2022
DENGAN REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022			TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkannya kualitas layanan infrastruktur	Persentase kondisi jalan mantap	67,45%	69,29 %	102,72 %	Rp. 130.590.455.391.	Rp.120.810.751.554,-
Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ke PU an	Persentase penduduk berakses air minum	95,31 %	92,54 %	97,09 %	Rp. 11.455.951.036,-	Rp. 10.675.082.213,-
Meningkatnya Bangunan Gedung Kantor yang Berketahanan	Persentase tersedianya bangunan gedung kantor yang sesuai standar bangunan tahan gempa	32,18 %	36,78 %	114,29 %	Rp. 49.075.731.240,-	Rp.46.593.681.340,-

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah, maka dapat kami simpulkan bahwa pada Tahun 2022 hampir seluruh program dan kegiatan telah memberikan kontribusi terhadap sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu.

Dari indikator sasaran yang ditetapkan masih ada indikator sasaran yang tingkat capaiannya belum memenuhi target yang ditentukan dan ini juga berpengaruh terhadap kinerja dinas. Sehingga secara umum dapat kami simpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2022 sudah cukup optimal.

Usaha-usaha terus kami lakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu serta pengalokasian anggaran kegiatan dengan melihat skala prioritas dan kemampuan penganggaran oleh pemerintah Kota Palu. Selanjutnya meningkatkan koordinasi dengan pihak pihak terkait dan juga peningkatan profesionalisme kerja terus dilakukan.

Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta dukungan semua pihak diharapkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu ditahun-tahun mendatang dapat lebih meningkat.

3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Program Penyelenggaraan Jalan				
1	1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi jalan mantap	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	Panjang Jalan yang ditingkatkan dan dipelihara	102,72 %
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
1	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) didaerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk berakses air minum	Panjang Jaringan air bersih yang terpasang	Panjang Jaringan air bersih yang terpasang	97,09 %

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
1	2	3	4	5	6
3	Program Penataan Bangunan Gedung				
1	1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung diwilayah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung kantor yang sesuai standar bangunan tahan gempa	Jumlah bangunan gedung kantor yang terbangun yang sesuai standar bangunan tahan gempa	Jumlah bangunan gedung kantor yang terbangun yang sesuai standar bangunan tahan gempa	114,29 %

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
1	2	3	4	5	6
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
1	1 Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Sakip		

a. Realisasi Anggaran

A. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2022 menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 217.517.381.460,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 201.745.571.786,- atau 92,75 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran

Uraian	Pagu 2022	Realisasi	
		(Rp)	(%)
1	2	3	4
BELANJA LANGSUNG	217,517,381,460.00	201,745,571,786.00	92.75
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119,758,000.00	117,343,000.00	97.98
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	34,343,250.00	34,173,250.00	99.50
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31,043,250.00	27,643,250.00	89.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,938,200.00	18,259,725.00	87.21
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,274,750.00	13,187,250.00	92.38
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,641,115,909.00	7,353,418,770.00	96.23
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36,901,500.00	36,717,500.00	99.50
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>			
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	106,350,000.00	104,585,000.00	98.34
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	148,275,000.00	146,910,000.00	99.08
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,223,000.00	11,411,660.00	93.36
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94,236,700.00	84,681,700.00	89.86
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67,659,270.00	64,785,350.00	95.75
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,412,250.00	27,203,440.00	86.60
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-			60.29

undangan	9,930,000.00	5,986,480.00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	56,036,500.00	39,271,500.00	70.08
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440,615,000.00	398,715,160.00	90.49
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,460,200.00	40,460,200.00	100.00
Pengadaan Alat Besar	780,000,000.00	765,790,457.00	98.18
Pengadaan Mebel	226,855,790.00	224,004,150.00	98.74
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159,300,000.00	135,695,682.00	85.18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,772,441,800.00	1,554,175,919.00	87.69
<i>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	367,380,700.00	236,230,430.00	64.30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	305,825,350.00	185,579,700.00	60.68
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	960,354,765.00	371,799,413.00	38.71
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	118,118,000.00	98,097,575.00	83.05
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1,103,051,440.00	977,744,756.00	88.64
<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1,188,392,640.00	1,178,451,800.00	99.16
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	695,677,200.00	680,161,349.00	97.77
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	178,617,500.00	100,385,500.00	56.20
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	301,867,500.00	299,597,700.00	99.25
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9,938,988,595.00	9,249,408,038.00	93.06
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1,036,477,440.00	1,025,690,975.00	98.96
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	251,105,950.00	131,870,349.00	52.52
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	239,625,000.00	236,625,000.00	98.75
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	357,450,000.00	352,671,450.00	98.66
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	8,261,494,885.00	7,405,052,405.00	89.63
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	593,972,495.00	566,588,284.00	95.39
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung</i>			
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	49,075,731,240.00	46,593,681,340.00	94.94
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1,663,648,499.00	1,632,930,500.00	98.15
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	14,870,287,267.00	12,118,075,029.00	81.49
Survei Kondisi Jalan/Jembatan	516,080,000.00	497,965,100.00	96.49
Pembangunan Jalan	55,987,864,780.00	52,500,333,750.00	93.77
Rehabilitasi Jalan	30,780,754,899.00	29,682,718,289.00	96.43
Pemeliharaan Berkala Jalan	18,834,895,500.00	16,812,411,379.00	89.26
Pemeliharaan Rutin Jalan	7,354,914,946.00	6,986,269,307.00	94.99
Pemeliharaan Rutin Jembatan	582,009,500.00	580,048,200.00	99.66
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>			
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50,282,500.00	897,225.00	1.78
<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>			
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	58,342,500.00	39,867,500.00	68.33

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Kota Palu Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dituangkan dalam bentuk kegiatan Tahun 2022. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya kerja sama antar seksi yang ada dalam organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu maupun dengan berbagai pihak baik itu relasi kerja (rekanan pihak ketiga) maupun dengan Dinas/Instansi lain.

Namun demikian capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu secara keseluruhan dirasakan belum maksimal, untuk itu perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Belum maksimalnya pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain :

1. Belum adanya standar penilaian kinerja yang normatif
2. Keterbatasan alokasi anggaran
3. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum maksimal
4. Terjadi keterlambatan dalam pencairan dana

Olehnya untuk tahun-tahun mendatang, diharapkan:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia tetap menjadi prioritas utama sehinggastandar mutu pekerjaan dan sistem pelaporan dapat tercapai.
2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana kerja guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Diperlukan formulasi dan teknik evaluasi yang memadai untuk menilai capaian kinerja dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Perlu menetapkan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan dana yang ada pada Pemerintah Kota serta dengan mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk menangani beberapa program/kegiatan.

Palu, Maret 2023

KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM KOTA PALU



Ir. SINGGIRI B. PRASETYO, M.Eng. Sc

Nip. 19641111 199703 1 003



.

LAMPIRAN

